

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

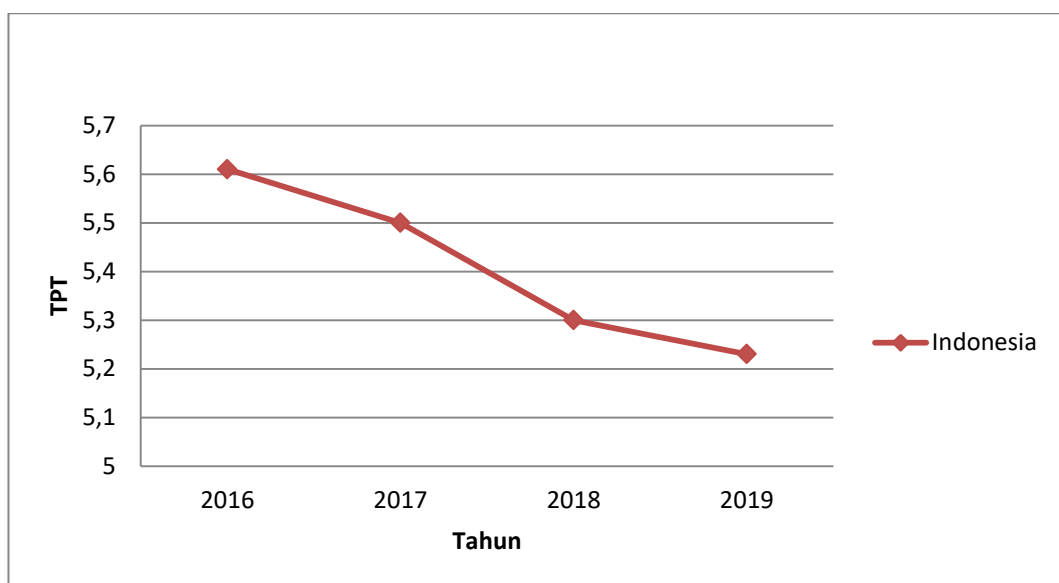
### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Pengangguran di Indonesia pada umumnya menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi di setiap wilayah. Pembangunan ekonomi merupakan proses untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka waktu panjang. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran serta tingkat pembangunan suatu negara. Selain itu, pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi pengangguran yang ada. Ketika pengangguran suatu negara meningkat maka pembangunan suatu negara sedang tidak sejahtera, sebaliknya pengangguran menurun di suatu negara maka negara tersebut sejahtera.

Pengangguran hakekatnya terjadi akibat penawaran kerja lebih besar dibanding permintaan tenaga kerja (*excess supply of labor*) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (*excess demand for labor*), dalam arti kesempatan kerja menjadi terbatas. Tingginya pengangguran dapat dilihat dari indikator tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS). Hal ini memungkinkan tingkat pengangguran terbuka dapat lebih menjelaskan jumlah

Pengangguran yang terjadi dan sebagai pengukur berkembang atau majunya sebuah negara. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia termasuk kategori tinggi yaitu sebesar 5%.

Berikut ini disajikan data yang telah diolah tentang Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia dari tahun 2016-2019 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :



**Gambar 1.1 : Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia  
Tahun 2016-2019 (Persen)**

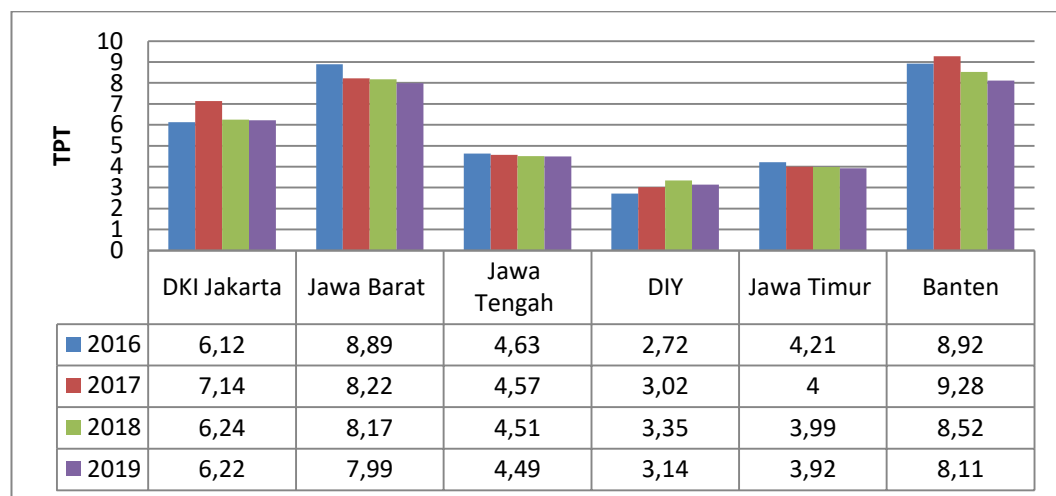
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia. Data telah diolah.

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2016 sebesar 5,61% mengalami penurunan di tahun 2017 angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,50%. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 5,23% dibandingkan tahun

2018 yang sebesar 5,30%.

Tingkat Pengangguran yang tinggi umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang cenderung padat penduduknya di Indonesia yaitu lebih berkontribusi di Pulau Jawa. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka normal disuatu wilayah adalah tidak lebih dari 4%. Jika dirata-rata dari 6 Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka menyumbang sebesar 5,64%, ini menyatakan lebih besar dibandingkan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia yang sebesar 5,23%.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa yang didalamnya terdiri 6 provinsi dari tahun 2016-2019, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah ini :



**Gambar 1.2 : Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa**

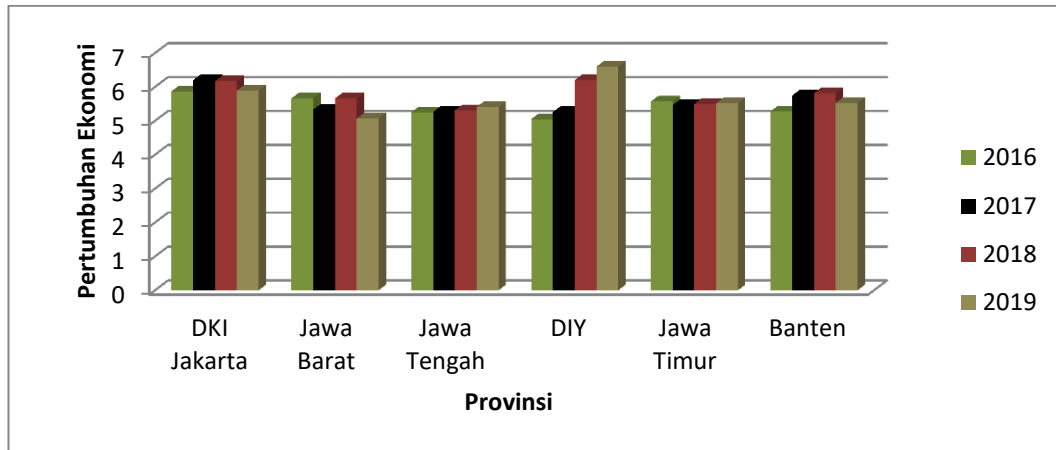
**Tahun 2016-2019 (Persen)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik provinsi di Pulau Jawa. Data telah diolah.*

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa berfluktuasi dari tahun 2016-2019. Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 6,12% meningkat di tahun 2017 menjadi sebesar 7,14% dan mengalami penurunan 6,24% di tahun 2018. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta sebesar 6,22% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu provinsi Banten menyumbang sebesar 8,11%. Posisi kedua provinsi Jawa Barat menyumbang sebesar 7,99%. Serta kontribusi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa paling rendah pada tahun 2019 yaitu provinsi DI Yogyakarta sebesar 3,14%. Dari kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa masih tinggi, mencerminkan belum berhasilnya upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan di suatu provinsi.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, karena biasanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita suatu daerah. Sadono Sukirno (2016:9) menegaskan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Peningkatan produksi akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik dibawah ini, terlihat selama 2016-2019 pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di Pulau Jawa terbilang positif.



**Gambar 1.3 : Pertumbuhan Ekonomi tiap Provinsi di Pulau Jawa  
Tahun 2016-2019 (Persen)**

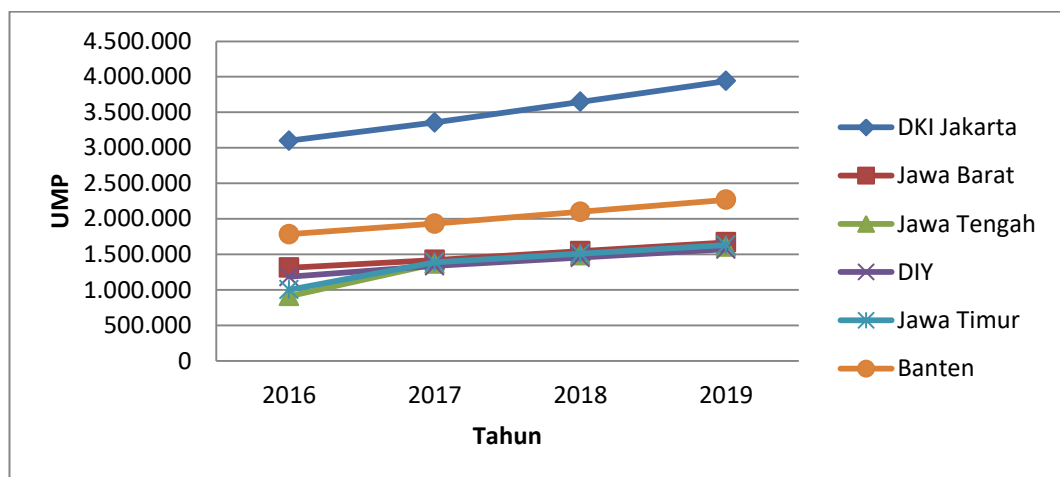
*Sumber : Badan Pusat Statistik provinsi di Pulau Jawa. Data Telah Diolah.*

Berdasarkan Gambar 1.3 pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat sebesar 5,66%, dan pada tahun 2017 turun sebesar 5,33%. Kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar 5,66%, serta mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5,07%, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat paling rendah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 provinsi DKI Jakarta sebesar 5,89%, Jawa Tengah sebesar 5,41%, Banten sebesar 5,53% serta Jawa Timur sebesar 5,52%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,60% di provinsi DI Yogyakarta. Meski begitu, pada tahun 2019 kondisi pertumbuhan PDRB di 4 provinsi menurun drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang

diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan tiap provinsi Pulau Jawa ini masih terbatas untuk menyerap tambahan tenaga kerja yang semakin meningkat sehingga pengangguran masih menjadi permasalahan yang krusial.

Upah memiliki peranan penting bagi para pekerja. Kenaikan upah minimum setiap tahunnya dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka sebab kenaikan upah minimum dirasakan sudah mencukupi kebutuhan oleh para pekerja sehingga dengan kenaikan upah minimum tersebut penganggur tidak lagi pilih-pilih dalam mencari pekerjaan dan langsung menerima tawaran pekerjaan yang ada. Hal tersebut akan menyebabkan pengangguran menjadi berkurang. (Kuntiarti, 2018:7)

Perkembangan upah minimum tiap Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berikut disajikan data Upah Minimum Provinsi dalam grafik dibawah ini :



**Gambar 1.4 : Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2019 (Rupiah)**

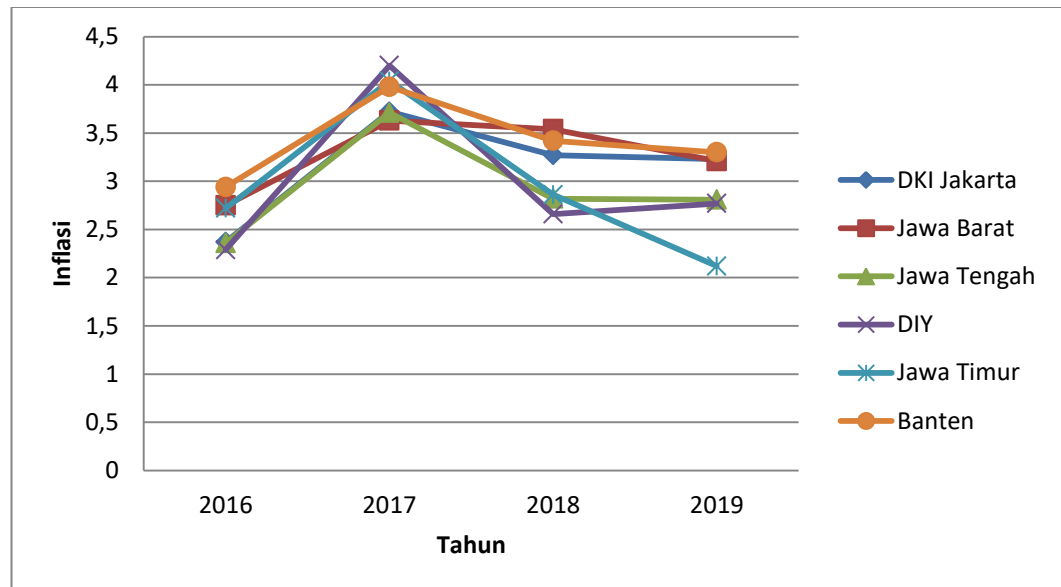
*Sumber : Badan Pusat Statistik provinsi di Pulau Jawa. Data telah diolah.*

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa yang ditetapkan oleh pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016, Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan DKI Jakarta sebesar Rp. 3.100.000 hingga 2018 upah tersebut meningkat tanpa mengalami penurunan hingga mencapai sebesar Rp. 3.648.035. Sehingga, Upah Minimum Provinsi tertinggi di Indonesia berada di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.940.973, kemudian diikuti oleh provinsi Banten sebesar Rp. 2.267.965, lalu Jawa Barat sebesar Rp. 1.668.372, Jawa Timur sebesar Rp. 1.630.059, Jawa Tengah sebesar Rp. 1.605.396, dan DI Yogyakarta sebesar Rp. 1.570.922. Peningkatan upah tersebut diikuti pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami fluktuasi di masing-masing provinsi selama periode waktu tersebut.

Selain itu, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah yaitu tingkat inflasi. Menurut Mankiw (dalam Nano, 2019:76), inflasi dapat diartikan gejala peningkatan harga barang-barang secara terus menerus dalam waktu panjang yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa atau pada periode tertentu nilai uang menurun. Menurut A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja.

Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan inflasi tinggi, pengangguran berkurang.

Kondisi inflasi tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2019 dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar 1.5 : Inflasi di Pulau Jawa Tahun 2016-2019 (Persen)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik provinsi di Pulau Jawa. Data Telah Diolah.*

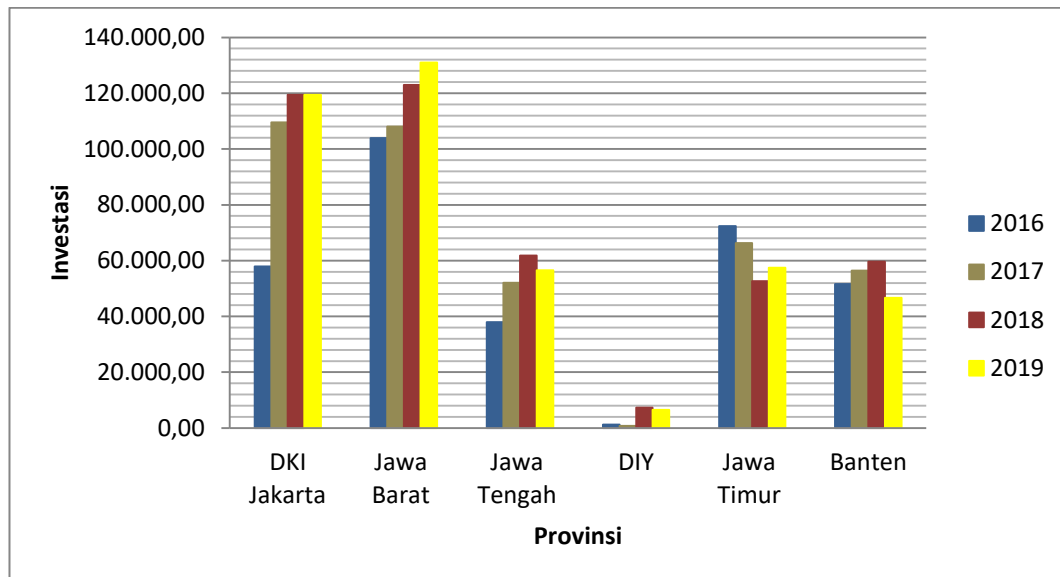
Berdasarkan Gambar 1.5 terlihat bahwa inflasi tiap provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2016-2019 berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2017, inflasi tertinggi yaitu berada di provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,20%, lalu provinsi Jawa Timur 4,04% dan di provinsi Banten sebesar 3,98%, DKI Jakarta sebesar 3,72%, inflasi 3,71% di Jawa Tengah, sedangkan di provinsi Jawa Barat inflasi sebesar 3,63%. Meski pada tahun 2018, inflasi di provinsi Banten sebesar 3,42% dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Di Pulau Jawa provinsi dengan inflasi tinggi pada tahun 2019 ini, didominasi oleh provinsi Banten sebesar 3,30%.



Sejalan dengan laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka pun mengalami fluktuasi, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Banten pada tahun 2019 sebanyak 8,11% menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,52%.

Investasi baik domestik maupun asing akan meningkatkan pertumbuhan teknologi, alih kepemilikan, perluasan lapangan kerja disertai dengan peningkatan keahlian dan keterampilan (Wiranata, 2004:12). Pembangunan ekonomi suatu negara membutuhkan biaya yang cukup besar, salah satunya diperoleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). PMA ini bisa masuk dalam bentuk investasi asing langsung yang dapat berupa pendirian pabrik guna menyerap tenaga kerja maupun investasi tidak langsung yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Serta, PMDN di sektor barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Berikut ini grafik perkembangan investasi tahun 2016-2019 tiap provinsi di Pulau Jawa, yang datanya telah diolah sebagai berikut :



**Gambar 1.6 : Realisasi Investasi di Pulau Jawa Tahun 2016-2019  
(Miliar Rupiah)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik provinsi di Pulau Jawa. Data Telah Diolah.*

Berdasarkan Gambar 1.6 terlihat bahwa realisasi investasi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2019. Investasi pada tahun 2016 di Jawa Barat sebesar 103.867,21 miliar rupiah lalu naik di tahun 2017 menjadi 108.066,61 miliar rupiah meningkat lagi di tahun 2018 sebesar 122.988,05 miliar rupiah dan paling tinggi berada pada tahun 2019 di provinsi Jawa Barat sebesar 131.035,98 miliar rupiah. Investasi tertinggi kedua pada tahun 2019 ada di provinsi DKI Jakarta sebesar 119.408,62 miliar rupiah, kemudian Jawa Timur sebesar 57.495,14 miliar rupiah, Jawa Tengah sebesar 56.509,90 miliar rupiah, Banten sebesar 46.678,25 miliar rupiah dan investasi terendah ada di DI

Yogyakarta sebesar 6.501,75 miliar rupiah. Maka investasi masih belum stabil dan merata, serta kurang konsisten dalam tiap tahunnya ada yang menaik dan ada yang menurun.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi dan investasi turut menentukan tingkat pengangguran di wilayah Pulau Jawa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya guna memperoleh suatu model tingkat pengangguran melalui faktor-faktor tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul yaitu **“ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PULAU JAWA TAHUN 2009-2019”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, teridentifikasi beberapa permasalahan berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2009-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2009-2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2009-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2009-2019.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya yaitu :

1. Bagi penulis, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan khususnya untuk memperdalam pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi, serta pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka.
2. Bagi Universitas, sebagai salah satu informasi tentang permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi dan tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Jawa, yang dapat digunakan untuk pembelajaran perkuliahan dan pengembangan keilmuan bagi mahasiswa.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Jawa.

4. Bagi Peneliti/Akademis Lain, sebagai bahan acuan bagi kelengkapan studi empiris yang sudah ada dan menjadi bahan masukan untuk penelitian sejenis, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi dan tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Jawa.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil objek tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Oleh karena itu, lokasi atau sumber data yang dijadikan objek penelitian adalah data sekunder yang berasal dari sumber terpercaya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) 6 Provinsi di Pulau Jawa diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten, serta sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada September 2020 sampai dengan Juni 2021 diawali dengan persiapan administrasi, pengajuan judul, pembuatan usulan penelitian, pendaftaran sidang usulan penelitian, sidang usulan penelitian, revisi usulan penelitian, analisis data, penyusunan skripsi, pendaftaran sidang komprehensif dan sidang komprehensif sebagai penutup. Berikut matriks jadwal penelitian ini :

